

Lampiran 1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
1	Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama & Hilda Rossieta (2018)	Transparansi pemerintahan lokal di Indonesia	Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan analisis regresi berganda..	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan melalui opini audit dan politik lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Di sisi lain, besar kecilnya tingkat respon pemerintah daerah dan pemerintah daerah terhadap peraturan tersebut tidak mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia.
2	Fikrinah Naopal, Sri Rahayu & Siska Priyandani Yudowati (2018)	Pengaruh Karakteristik Daerah, Jumlah Penduduk, Temuan Audit, dan Opini Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS versi 17.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat. Umur pemerintahan dan opini audit memiliki pengaruh positif sedangkan ukuran pemerintahan, jumlah penduduk dan temuan audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
3	Erlinda Dian Fransiska (2018)	Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Audit, dan Government Grade terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia	Analisis ordinal logistic regression (OLR) digunakan dalam penelitian ini untuk menguji temuan audit, rekomendasi audit dan government grade dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.	Hasilnya menunjukkan bahwa temuan audit dan rekomendasi audit tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sementara peringkat daerah atau government grade berpengaruh positif.
4	Sonya Nadia Tarihoran (2018)	Pengaruh Temuan Audit Bpk, Opini Audit Bpk, Ukuran Pemerintahan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016	Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.	Temuan audit BPK, opini audit BPK, ukuran pemerintahan, dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Secara simultan, temuan audit BPK, opini audit BPK, ukuran pemerintahan dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, opini audit BPK dan ukuran pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
5	Wardahayati, Sarwani & Atma Hayat (2019)	Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, Tindak Lanjut Audit, Serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia)	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif untuk menjelaskan pengaruh variabel X terhadap Y dengan menggunakan uji statistik yang didukung dengan model regresi asumsi klasik program SPSS.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil audit, tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi di pemerintah provinsi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah provinsi yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan temuan audit dan tindak lanjut audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak berperan terhadap tingkat korupsi pemerintah provinsi di Indonesia.
6	Muhammad Ihsan Siregar & Jumadi Rudiansyah (2019)	Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/kota Sumatera	Regresi logistik (logistic regression) merupakan suatu bentuk regresi yang digunakan pada saat variabel tak bebas (dependent variabel) bersifat kategorik, dan regresi logistik biner digunakan jika kategori pada variabel tak bebas bersifat dikotomis.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah temuan atas pemeriksaan SPI dan jumlah temuan atas pemeriksaan kepatuhan secara parsial berpengaruh terhadap opini audit Badan Pemeriksa Keuangan.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
7	Rollis Ayu Ditasari & Muhamad Agus Sudrajat (2020)	Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur	Pengujian data dilakukan dengan menggunakan: Uji statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, Regresi linier berganda dan Uji hipotesis Koefisien Determinasi R dan uji t. Peneliti mengolah data penelitian dengan menggunakan software khusus yaitu IBM SPSS Statistics.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Opini Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur, Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Timur.
8	Andi Chairil Furqan, Ratna Wardhani, Dwi Martani and Dyah Setyaningrum (2020)	Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi audit atas laporan keuangan dan publik kualitas layanan di Indonesia	Penelitian ini menggunakan regresi cross-sectional menggunakan data dari 1,437 observasi dari 491 kabupaten/kota selama tahun 2014–2016.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik. Mengenai pelaksanaan audit di sektor publik, ditemukan juga bahwa audit temuan berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik, sedangkan audit tindak lanjut rekomendasi berperan positif dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
9	Maulidya Rahmi & Nita Erika Ariani (2020)	Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis regresi logistik ordinal (Ordinal Logistic Regression) dengan bantuan program SPSS (Statistical Product and Service Solutions).	Temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
10	Rafrini Amyulianthy, Andi Sayyidatun Ufairah Anto, & Shinta Budi (2020)	Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit	Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan data panel, uji t, uji F, koefisien determinasi (Adj R ²)	Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap opini audit di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, bahwa semakin banyak temuan yang berupa ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Undang-Undang yang di dapatkan oleh auditor BPK.

NO	PENELITI	JUDUL	METODE ANALISIS	HASIL
11	Ghina Imtinan & David HM Hasibuan (2021)	Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Kementerian	Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Teknik analisisnya yaitu analisis regresi berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa secara parsial atau uji t oleh uji SPSS disimpulkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan kementerian. Untuk hasil uji f atau secara simultan temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.
12	Raymundo Patria Hayu Sasmita (2021)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit BPK Terhadap Understandability Dalam Kualitas Laporan Keuangan	Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel menggunakan <i>software</i> E-views 8.0.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur administratif pemerintah daerah dan opini audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu, ukuran, <i>leverage</i> , ketergantungan, dan belanja daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Lampiran 2.

Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel

VARIABEL	DEFINISI	PENGUKURAN	SKALA PENGUKURAN
Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa terkait tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	Opini WTP = 4 Opini WDP = 3 Opini Tidak Wajar = 2 Opini Tidak Menyatakan Pendapat = 1	Nominal
Variabel Independen: Temuan Audit (X1)	Masalah material terkait kelemahan penerapan sistem pengendalian intern di organisasi.	Jumlah temuan audit	Ratio
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X2)	Rangkaian kegiatan/perbaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang telah sesuai dengan rekomendasi BPK	Jumlah seluruh rekomendasi yang diberikan BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	Ratio
Ukuran Pemerintahan Daerah (X3)	Ukuran pemerintah daerah menunjukkan besar atau kecilnya pemerintah daerah.	Total Aset	Nominal

Lampiran 3.**Kriteria Sampel Penelitian****Data Penelitian**

Keterangan	n
Pemerintah Daerah Indonesia Tahun 2018	514
Pemerintah daerah Indonesia yang tidak membagikan laporan keuangan 2018	(6)
Sampel yang diperoleh	8

Daftar Penduduk dan Sampel Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019

NO	WILAYAH	POPULASI	PERSENTASE (%)	SAMPEL
1	Provinsi Aceh	23	4.5	23
2	Provinsi Sumatera Utara	33	6.5	33
3	Provinsi Sumatera Barat	19	3.7	19
4	Provinsi Riau	12	2.4	12
5	Provinsi Jambi	11	2.2	11
6	Provinsi Sumatera Selatan	17	3.3	17
7	Provinsi Bengkulu	10	2.0	10
8	Provinsi Lampung	15	3.0	15
9	Provinsi Kep. Bangka Belitung	7	1.4	7
10	Provinsi Kep.Riau	7	1.4	7
11	Provinsi DKI Jakarta	6		-
12	Provinsi Jawa Barat	27	5.3	27
13	Provinsi Jawa Tengah	35	6.9	35
14	Provinsi D.I.Yogyakarta	5	1.0	5
15	Provinsi Jawa Timur	38	7.5	38
16	Provinsi Banten	8	1.6	8
17	Provinsi Bali	9	1.8	9
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat	10	2.0	10
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur	21	4.3	22
20	Provinsi Kalimantan Barat	14	2.8	14

NO	WILAYAH	POPULASI	PERSENTASE (%)	SAMPEL
21	Provinsi Kalimantan Tengah	14	2.8	14
22	Provinsi Kalimantan Selatan	13	2.6	13
23	Provinsi Kalimantan Timur	10	2.0	10
24	Provinsi Kalimantan Utara	5	1.0	5
25	Provinsi Sulawesi Utara	15	3.0	15
26	Provinsi Sulawesi Tengah	13	2.6	13
27	Provinsi Sulawesi Selatan	24	4.7	24
28	Provinsi Sulawesi Tenggara	17	3.3	17
29	Provinsi Gorontalo	6	1.2	6
30	Provinsi Sulawesi Barat	6	1.2	6
31	Provinsi Maluku	11	2.2	11
32	Provinsi Maluku Utara	10	2.0	10
33	Provinsi Papua	29	5.7	29
34	Provinsi Papua Barat	13	2.6	13
TOTAL		514	100	508

Lampiran 4.

Tabulasi Data

Data Observasi untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit, dan Rekomendasi Audit

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1	Kabupaten Aceh Barat	17	52	3.264.165.725.964,72	28,81	4
2	Kabupaten Aceh Barat Daya	8	14	1.893.303.542.796,43	28,27	4
3	Kabupaten Aceh Besar	12	29	3.010.679.175.709,24	28,73	4
4	Kabupaten Aceh Jaya	13	27	2.344.958.430.892,56	28,48	4
5	Kabupaten Aceh Selatan	13	36	2.633.404.607.935,56	28,60	4
6	Kabupaten Aceh Singkil	17	41	145.518.629.229,93	25,70	4
7	Kabupaten Aceh Tamiang	14	46	2.648.962.985.610,63	28,61	4
8	Kabupaten Aceh Tengah	13	34	2.480.736.268.990,14	28,54	4
9	Kabupaten Aceh Tenggara	16	59	3.211.821.910.332,54	28,80	4
10	Kabupaten Aceh Timur	10	41	3.252.701.628.704,30	28,81	4
11	Kabupaten Aceh Utara	12	59	4.674.629.568.665,75	29,17	4
12	Kabupaten Bener Meriah	20	67	1.622.778.403.245,64	28,12	4
13	Kabupaten Bireuen	15	47	3.163.869.086.138,26	28,78	4
14	Kabupaten Gayo Lues	16	57	2.141.664.594.394,76	28,39	4
15	Kabupaten Nagan Raya	10	28	2.010.273.233.078,92	28,33	4
16	Kabupaten Pidie	11	31	3.563.892.518.365,43	28,90	4
17	Kabupaten Pidie Jaya	11	29	1.831.494.076.674,93	28,24	4
18	Kabupaten Simeulue	10	22	1.630.310.841.715,53	28,12	4
19	Kota Banda Aceh	11	15	5.364.536.864.574,90	29,31	4
20	Kota Langsa	11	24	1.878.172.258.047,03	28,26	4
21	Kota Lhokseumawe	25	62	1.839.921.956.062,94	28,24	4
22	Kota Sabang	14	40	1.332.313.604.292,03	27,92	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
23	Kota Subulussalam	18	52	1.350.168.818.591,34	27,93	3
24	Kabupaten Asahan	7	60	3.497.418.427.563,32	28,88	4
25	Kabupaten Batu Bara	12	44	2.210.470.469.949,35	28,42	4
26	Kabupaten Dairi	16	72	2.044.203.819.038,24	28,35	4
27	Kabupaten Deli Serdang	12	58	7.388.243.974.872,26	29,63	4
28	Kabupaten Humbang Hasundutan	15	59	1.936.667.387.692,08	28,29	4
29	Kabupaten Karo	11	52	2.657.602.578.249,09	28,61	4
30	Kabupaten Labuhanbatu	11	77	2.743.998.418.227,62	28,64	3
31	Kabupaten Labuhan batu Selatan	12	35	1.410.003.319.270,71	27,97	4
32	Kabupaten Labuhanbatu Utara	16	89	1.902.850.954.979,87	28,27	4
33	Kabupaten Langkat	10	44	4.065.203.938.363,79	29,03	4
34	Kabupaten Mandailing Natal	16	146	2.024.586.547.347,84	28,34	3
35	Kabupaten Nias	14	134	2.088.344.627.214,14	28,37	3
36	Kabupaten Nias Barat	17	85	1.119.502.087.189,77	27,74	3
37	Kabupaten Nias Selatan	26	121	1.928.967.344.572,73	28,29	3
38	Kabupaten Nias Utara	8	36	1.863.481.789.400,00	28,25	3
39	Kabupaten Padang Lawas	14	61	1.675.570.118.253,86	28,15	4
40	Kabupaten Padang Lawas Utara	9	46	1.355.145.484.010,66	27,93	4
41	Kabupaten Pakpak Bharat	13	95	990.387.418.017,99	27,62	3
42	Kabupaten Samosir	9	37	1.605.087.091.045,22	28,10	4
43	Kabupaten Serdang Bedagai	9	54	2.236.316.069.278,84	28,44	4
44	Kabupaten Simalungun	17	69	3.284.436.761.838,84	28,82	3
45	Kabupaten Tapanuli Selatan	12	45	2.485.661.370.932,06	28,54	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
46	Kabupaten Tapanuli Tengah	16	79	1.863.865.815.081,80	28,25	3
47	Kabupaten Tapanuli Utara	13	63	2.117.334.928.692,46	28,38	4
48	Kabupaten Toba Samosir	8	40	1.827.631.250.055,66	28,23	4
49	Kota Binjai	14	53	1.336.669.070.968,39	27,92	4
50	Kota Gunungsitoli	8	45	1.598.436.856.802,73	28,10	4
51	Kota Medan	22	163	32.901.545.838.667,00	31,12	3
52	Kota Padangsidempuan	15	76	1.281.397.953.465,40	27,88	3
53	Kota Pematangsiantar	17	71	3.270.531.957.767,83	28,82	3
54	Kota Sibolga	9	47	1.573.618.064.557,01	28,08	4
55	Kota Tanjungbalai	18	99	1.241.011.560.056,15	27,85	3
56	Kota Tebing Tinggi	12	38	1.832.547.754.639,60	28,24	4
57	Kabupaten Agam	16	33	2.044.621.244.972,68	28,35	4
58	Kabupaten Dharmasraya	12	25	245.307.420.588,30	26,23	2
59	Kabupaten Kepulauan Mentawai	18	34	1.982.154.270.964,04	28,32	2
60	Kabupaten Lima Puluh Kota	17	46	1.724.913.174.765,78	28,18	4
61	Kabupaten Padang Pariaman	11	19	1.365.011.320.042,26	27,94	2
62	Kabupaten Pasaman	7	14	1.879.392.164.407,87	28,26	4
63	Kabupaten Pasaman Barat	8	18	2.263.430.974.784,05	28,45	2
64	Kabupaten Pesisir Selatan	17	40	2.309.214.735.539,21	28,47	2
65	Kabupaten Sijunjung	11	23	1.766.620.398.428,16	28,20	2
66	Kabupaten Solok	11	28	1.710.627.043.381,63	28,17	2
67	Kabupaten Solok Selatan	9	13	1.805.250.097.091,17	28,22	2
68	Kabupaten Tanah Datar	22	60	1.318.662.252.968,83	27,91	2
69	Kota Bukittinggi	18	52	1.620.883.912.558,68	28,11	2
70	Kota Padang	24	58	7.813.369.096.917,56	29,69	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
71	Kota Padangpanjang	11	26	1.253.357.292.656,43	27,86	2
72	Kota Pariaman	11	19	866.797.314.216,18	27,49	4
73	Kota Payakumbuh	13	30	1.357.209.198.896,00	27,94	4
74	Kota Sawahlunto	8	16	760.706.569.698,01	27,36	4
75	Kota Solok	12	24	1.542.290.010.791,60	28,06	4
76	Kabupaten Bengkulu	11	23	9.910.580.751.653,20	29,92	4
77	Kabupaten Indragiri Hilir	15	22	3.919.158.883.535,03	29,00	4
78	Kabupaten Indragiri Hulu	10	25	3.379.025.156.174,11	28,85	4
79	Kabupaten Kampar	10	20	4.585.418.749.412,72	29,15	4
80	Kabupaten Kepulauan Meranti	7	7	2.981.321.583.410,56	28,72	4
81	Kabupaten Kuantan Singingi	14	32	2.763.569.727.056,48	28,65	4
82	Kabupaten Pelalawan	11	22	4.163.112.007.662,49	29,06	4
83	Kabupaten Rokan Hilir	13	22	5.996.430.255.085,47	29,42	4
84	Kabupaten Rokan Hulu	12	20	3.281.410.061.069,73	28,82	4
85	Kabupaten Siak	9	17	6.390.388.112.371,78	29,49	4
86	Kota Dumai	11	31	326.113.178.463,59	26,51	4
87	Kota Pekanbaru	9	18	7.548.887.211.908,94	29,65	4
88	Kabupaten Bintan	10	32	2.719.588.572.133,34	28,63	4
89	Kabupaten Karimun	13	34	2.239.130.072.499,45	28,44	4
90	Kabupaten Kepulauan Anambas	18	51	1.905.003.912.037,80	28,28	4
91	Kabupaten Lingga	15	34	1.813.559.498.130,95	28,23	4
92	Kabupaten Natuna	15	31	2.898.543.298.014,44	28,70	4
93	Kota Batam	11	28	6.110.123.116.410,46	29,44	2
94	Kota Tanjung Pinang	9	22	1.839.341.352.919,26	28,24	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
95	Kabupaten Batanghari	13	27	1.935.179.309.945,67	28,29	4
96	Kabupaten Bungo	13	32	1.804.261.997.257,13	28,22	4
97	Kabupaten Kerinci	14	41	1.709.156.740.641,16	28,17	4
98	Kabupaten Merangin	12	24	2.170.243.863.472,49	28,41	4
99	Kabupaten Muaro Jambi	9	17	2.389.072.688.661,79	28,50	4
100	Kabupaten Sarolangun	26	101	2.615.570.252.084,07	28,59	4
101	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	13	29	4.278.433.917.849,69	29,08	4
102	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	11	35	2.132.858.920.772,18	28,39	4
103	Kabupaten Tebo	13	34	2.310.498.312.869,94	28,47	4
104	Kota Jambi	17	35	3.708.402.237.333,31	28,94	4
105	Kota Sungaipenuh	16	25	1.360.213.020.030,33	27,94	4
106	Kabupaten Bengkulu Selatan	14	51	1.311.632.691.534,36	27,90	3
107	Kabupaten Bengkulu Tengah	12	6	1.368.625.982.380,98	27,94	4
108	Kabupaten Bengkulu Utara	17	36	1.724.767.982.368,53	28,18	4
109	Kabupaten Kaur	15	32	1.272.805.893.646,03	27,87	4
110	Kabupaten Kepahiang	13	32	1.281.086.977.233,48	27,88	4
111	Kabupaten Lebong	12	30	1.625.873.802.237,23	28,12	4
112	Kabupaten Mukomuko	11	22	1.777.319.933.277,21	28,21	4
113	Kabupaten Rejang Lebong	10	30	1.632.809.939.154,72	28,12	4
114	Kabupaten Seluma	14	39	1.715.456.471.745,39	28,17	3
115	Kota Bengkulu	16	52	1.839.499.819.214,29	28,24	4
116	Kabupaten Banyuasin	11	28	4.215.741.205.022,83	29,07	4
117	Kabupaten Empat Lawang	21	55	2.138.643.391.091,73	28,39	4
118	Kabupaten Lahat	16	43	3.283.060.471.148,85	28,82	4
119	Kabupaten Muara Enim	22	76	5.942.488.488.666,14	29,41	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
120	Kabupaten Musi Banyuasin	13	35	8.913.188.475.534,97	29,82	4
121	Kabupaten Musi Rawas	23	66	4.060.690.864.699,16	29,03	4
122	Kabupaten Musi Rawas Utara	22	59	2.005.436.170.499,76	28,33	4
123	Kabupaten Ogan Ilir	16	44	2.485.833.863.046,42	28,54	4
124	Kabupaten Ogan Komering Ilir	14	38	4.356.787.180.814,80	29,10	4
125	Kabupaten Ogan Komering Ulu	16	35	3.223.304.182.546,86	28,80	4
126	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	18	60	2.939.157.028.257,17	28,71	4
127	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	12	33	2.562.790.507.734,65	28,57	4
128	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	12	33	2.751.153.765.290,68	28,64	4
129	Kota Lubuklinggau	9	31	2.564.719.956.827,78	28,57	4
130	Kota Pagar Alam	21	49	2.198.965.996.855,11	28,42	4
131	Kota Palembang	22	67	16.278.370.872.549,00	30,42	4
132	Kota Prabumulih	20	54	2.501.589.009.873,62	28,55	4
133	Kabupaten Bangka	14	46	2.057.413.651.170,49	28,35	4
134	Kabupaten Bangka Barat	14	39	1.467.531.086.911,07	28,01	4
135	Kabupaten Bangka Selatan	12	24	1.628.728.466.299,51	28,12	4
136	Kabupaten Bangka Tengah	10	24	1.474.197.198.235,22	28,02	4
137	Kabupaten Belitung	12	39	2.281.470.687.430,26	28,46	3
138	Kabupaten Belitung Timur	18	44	1.595.511.090.876,35	28,10	4
139	Kota Pangkal Pinang	18	56	3.059.827.513.738,60	28,75	4
140	Kabupaten Lampung Barat	13	24	2.386.359.299.711,79	28,50	4
141	Kabupaten Lampung Selatan	13	23	3.549.948.254.040,07	28,90	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
142	Kabupaten Lampung Tengah	16	34	3.267.504.094.249,08	28,82	4
143	Kabupaten Lampung Timur	14	31	2.666.777.426.174,38	28,61	4
144	Kabupaten Lampung Utara	17	36	2.394.331.066.570,76	28,50	3
145	Kabupaten Mesuji	18	45	1.976.866.510.901,64	28,31	3
146	Kabupaten Pesawaran	16	33	2.308.468.935.892,01	28,47	4
147	Kabupaten Pesisir Barat	15	36	1.561.581.151.321,83	28,08	4
148	Kabupaten Pringsewu	15	34	2.049.637.744.012,24	28,35	4
149	Kabupaten Tanggamus	13	31	2.215.423.375.256,55	28,43	4
150	Kabupaten Tulang Bawang	13	30	2.100.160.708.768,25	28,37	4
151	Kabupaten Tulang Bawang Barat	13	34	2.397.292.274.914,58	28,51	4
152	Kabupaten Way Kanan	14	27	2.524.192.046.313,40	28,56	4
153	Kota Bandar Lampung	12	24	5.341.823.605.415,54	29,31	4
154	Kota Metro	21	56	2.941.250.863.589,27	28,71	4
155	Kabupaten Lebak	4	6	4.265.888.913.428,26	29,08	4
156	Kabupaten Pandeglang	12	23	3.100.639.444.322,71	28,76	4
157	Kabupaten Serang	11	12	3.817.359.889.023,82	28,97	4
158	Kabupaten Tangerang	9	14	16.954.547.220.336,60	30,46	4
159	Kota Cilegon	7	7	4.716.039.121.989,83	29,18	4
160	Kota Serang	12	15	2.890.976.547.098,36	28,69	4
161	Kota Tangerang	12	13	8.195.102.894.924,88	29,73	4
162	Kota Tangerang Selatan	10	12	21.036.338.664.456,00	30,68	4
163	Kabupaten Bandung	14	53	11.263.980.756.266,30	30,05	4
164	Kabupaten Bandung Barat	11	31	3.481.844.482.544,50	28,88	4
165	Kabupaten Bekasi	18	68	13.071.854.740.463,00	30,20	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
166	Kabupaten Bogor	12	34	26.492.593.450.206,30	30,91	4
167	Kabupaten Ciamis	13	40	3.752.059.968.699,63	28,95	4
168	Kabupaten Cianjur	17	43	6.525.736.823.289,67	29,51	4
169	Kabupaten Cirebon	13	28	4.575.490.416.349,12	29,15	4
170	Kabupaten Garut	15	32	4.827.037.991.824,95	29,21	4
171	Kabupaten Indramayu	10	28	5.795.777.607.533,26	29,39	2
172	Kabupaten Karawang	23	70	5.354.357.417.461,18	29,31	4
173	Kabupaten Kuningan	7	26	2.383.476.298.067,13	28,50	4
174	Kabupaten Majalengka	11	28	4.882.131.240.028,52	29,22	4
175	Kabupaten Pangandaran	16	76	2.172.555.748.635,63	28,41	4
176	Kabupaten Purwakarta	17	69	2.718.473.769.472,00	28,63	4
177	Kabupaten Subang	13	39	4.934.942.019.473,15	29,23	4
178	Kabupaten Sukabumi	18	35	4.356.783.715.734,58	29,10	4
179	Kabupaten Sumedang	12	32	3.400.816.817.776,45	28,86	4
180	Kabupaten Tasikmalaya	11	30	5.191.376.221.321,44	29,28	2
181	Kota Bandung	20	57	4.352.567.487.019,00	29,10	4
182	Kota Banjar	17	45	1.711.898.733.593,80	28,17	4
183	Kota Bekasi	18	60	13.504.843.694.600,00	30,23	4
184	Kota Bogor	12	17	8.450.865.944.760,55	29,77	4
185	Kota Cimahi	12	17	2.698.443.733.676,94	28,62	4
186	Kota Cirebon	18	39	3.908.027.656.912,05	28,99	4
187	Kota Depok	15	44	12.066.798.550.548,30	30,12	4
188	Kota Sukabumi	12	29	1.785.690.796.502,00	28,21	4
189	Kota Tasikmalaya	9	38	3.544.157.788.466,66	28,90	4
190	Kabupaten Banjarnegara	14	32	4.469.370.847.873,06	29,13	4
191	Kabupaten Banyumas	14	31	6.226.652.415.512,68	29,46	4
192	Kabupaten Batang	17	46	2.664.373.528.271,74	28,61	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
193	Kabupaten Blora	16	31	3.362.562.896.873,61	28,84	4
194	Kabupaten Boyolali	11	18	3.770.144.077.202,44	28,96	4
195	Kabupaten Boyolali	16	51	4.187.462.596.274,53	29,06	2
196	Kabupaten Cilacap	13	42	5.735.055.789.650,53	29,38	4
197	Kabupaten Demak	9	31	5.450.473.201.190,25	29,33	4
198	Kabupaten Grobogan	9	18	3.642.816.444.594,56	28,92	4
199	Kabupaten Jepara	9	13	6.091.852.915.428,56	29,44	4
200	Kabupaten Karanganyar	7	11	3.476.924.970.374,69	28,88	4
201	Kabupaten Kebumen	13	30	4.482.323.838.554,00	29,13	4
202	Kabupaten Kendal	7	20	3.026.908.855.357,08	28,74	4
203	Kabupaten Klaten	17	37	4.157.398.988.909,00	29,06	4
204	Kabupaten Kudus	11	34	4.468.531.280.044,62	29,13	4
205	Kabupaten Magelang	12	25	3.270.629.440.572,02	28,82	4
206	Kabupaten Pati	12	18	6.439.754.615.979,58	29,49	4
207	Kabupaten Pekalongan	12	28	3.020.680.906.818,08	28,74	4
208	Kabupaten Pemalang	13	37	3.786.927.056.410,92	28,96	4
209	Kabupaten Purbalingga	14	33	3.846.328.687.092,87	28,98	4
210	Kabupaten Purworejo	9	19	2.987.231.520.048,19	28,73	4
211	Kabupaten Rembang	13	29	2.143.033.080.689,93	28,39	4
212	Kabupaten Semarang	4	7	4.689.787.427.166,48	29,18	4
213	Kabupaten Sragen	13	37	3.941.848.384.832,37	29,00	4
214	Kabupaten Sukoharjo	8	14	519.465.435.894,62	26,98	4
215	Kabupaten Tegal	12	19	3.377.567.475.085,03	28,85	4
216	Kabupaten Temanggung	10	20	3.240.096.678.946,35	28,81	4
217	Kabupaten Wonogiri	16	25	3.740.376.254.030,79	28,95	4
218	Kabupaten Wonosobo	13	27	3.390.531.356.578,04	28,85	4
219	Kota Magelang	8	15	4.612.815.488.651,14	29,16	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
220	Kota Pekalongan	9	17	2.856.674.222.675,30	28,68	4
221	Kota Salatiga	14	45	3.072.155.684.616,59	28,75	4
222	Kota Semarang	14	32	18.159.413.566.476,00	30,53	4
223	Kota Surakarta	12	22	11.719.105.713.695,20	30,09	4
224	Kota Tegal	8	13	2.417.612.856.682,85	28,51	4
225	Kabupaten Bantul	8	16	3.446.419.741.778,31	28,87	4
226	Kabupaten Gunungkidul	5	14	3.031.266.301.154,32	28,74	4
227	Kabupaten Kulon Progo	8	19	2.371.620.969.473,02	28,49	4
228	Kabupaten Sleman	11	24	4.889.673.225.382,27	29,22	4
229	Kota Yogyakarta	14	42	4.246.893.437.243,72	29,08	4
230	Kabupaten Bangkalan	12	41	3.219.383.015.298,06	28,80	4
231	Kabupaten Banyuwangi	7	23	4.413.371.980.841,05	29,12	4
232	Kabupaten Blitar	9	27	4.448.281.215.370,09	29,12	4
233	Kabupaten Bojonegoro	14	40	12.750.710.236.133,00	30,18	4
234	Kabupaten Bondowoso	9	24	296.231.735.456,56	26,41	4
235	Kabupaten Gresik	11	25	6.306.091.367.346,16	29,47	4
236	Kabupaten Jember	17	44	5.223.848.992.922,33	29,28	1
237	Kabupaten Jombang	12	21	3.742.457.330.721,85	28,95	4
238	Kabupaten Kediri	14	25	4.753.770.809.567,60	29,19	4
239	Kabupaten Lamongan	15	39	5.359.757.062.703,33	29,31	4
240	Kabupaten Lumajang	10	17	2.394.009.524.655,35	28,50	4
241	Kabupaten Madiun	8	24	4.162.865.455.741,13	29,06	4
242	Kabupaten Magetan	8	15	2.229.958.907.039,98	28,43	4
243	Kabupaten Malang	10	25	6.985.183.955.290,12	29,57	4
244	Kabupaten Mojokerto	12	29	5.925.977.315.672,46	29,41	4
245	Kabupaten Nganjuk	11	20	3.351.351.994.242,72	28,84	4
246	Kabupaten Ngawi	7	18	4.001.368.522.153,23	29,02	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
247	Kabupaten Pacitan	15	36	2.349.171.640.733,09	28,49	4
248	Kabupaten Pamekasan	12	28	3.649.901.120.551,89	28,93	4
249	Kabupaten Pasuruan	9	21	4.257.002.171.309,09	29,08	4
250	Kabupaten Ponorogo	8	19	2.618.670.030.237,76	28,59	4
251	Kabupaten Probolinggo	16	29	2.441.287.793.257,01	28,52	4
252	Kabupaten Sampang	15	39	4.025.493.448.585,42	29,02	4
253	Kabupaten Sidoarjo	11	39	20.784.629.034.467,40	30,67	4
254	Kabupaten Situbondo	16	45	3.679.611.549.365,70	28,93	4
255	Kabupaten Sumenep	12	41	3.857.805.753.607,41	28,98	4
256	Kabupaten Trenggalek	10	18	2.412.125.512.364,07	28,51	4
257	Kabupaten Tuban	9	17	7.141.285.838.190,56	29,60	4
258	Kabupaten Tulungagung	11	25	4.070.130.778.316,25	29,03	4
259	Kota Batu	14	29	2.009.936.155.097,24	28,33	4
260	Kota Blitar	15	37	2.644.733.042.031,17	28,60	4
261	Kota Kediri	18	37	3.038.283.656.820,18	28,74	4
262	Kota Madiun	13	30	2.658.741.300.273,45	28,61	4
263	Kota Malang	11	42	6.391.773.253.297,18	29,49	4
264	Kota Mojokerto	8	17	1.972.997.116.579,38	28,31	4
265	Kota Pasuruan	10	24	3.097.452.246.774,37	28,76	3
266	Kota Probolinggo	12	37	1.688.836.085.886,70	28,16	4
267	Kota Surabaya	11	27	44.693.653.396.745,60	31,43	4
268	Kabupaten Badung	14	46	13.418.079.328.133,90	30,23	4
269	Kabupaten Bangli	11	23	1.312.025.670.004,36	27,90	4
270	Kabupaten Buleleng	5	12	2.601.452.999.646,12	28,59	4
271	Kabupaten Gianyar	8	0	2.616.666.294.378,78	28,59	4
272	Kabupaten Jembrana	8	14	2.297.545.486.296,36	28,46	4
273	Kabupaten Karangasem	5	13	1.504.712.724.478,65	28,04	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
274	Kabupaten Klungkung	8	17	1.096.396.423.936,86	27,72	4
275	Kabupaten Tabanan	17	17	2.264.694.731.297,98	28,45	4
276	Kota Denpasar	6	10	6.229.493.186.998,86	29,46	4
277	Kabupaten Bima	13	41	2.690.543.655.162,21	28,62	4
278	Kabupaten Dompu	17	56	1.763.547.302.525,37	28,20	4
279	Kabupaten Lombok Barat	9	38	2.676.682.869.308,61	28,62	4
280	Kabupaten Lombok Tengah	10	44	3.152.742.787.147,06	28,78	4
281	Kabupaten Lombok Timur	12	47	3.501.590.403.478,28	28,88	4
282	Kabupaten Lombok Utara	9	21	1.885.196.980.202,31	28,27	4
283	Kabupaten Sumbawa	16	43	3.273.196.407.509,77	28,82	4
284	Kabupaten Sumbawa Barat	14	26	2.328.459.106.953,88	28,48	4
285	Kota Bima	18	49	1.501.659.180.292,83	28,04	4
286	Kota Mataram	13	44	3.361.542.511.781,16	28,84	4
287	Kabupaten Alor	10	23	1.465.484.229.875,80	28,01	3
288	Kabupaten Belu	5	7	1.600.324.764.807,99	28,10	4
289	Kabupaten Ende	12	20	1.567.271.786.028,92	28,08	3
290	Kabupaten Flores Timur	14	33	1.380.545.474.817,55	27,95	3
291	Kabupaten Kupang	9	23	2.151.515.522.369,79	28,40	3
292	Kabupaten Lembata	28	57	1.034.291.099.567,86	27,66	3
293	Kabupaten Malaka	10	19	1.290.595.155.526,85	27,89	4
294	Kabupaten Manggarai	18	35	2.014.904.104.622,40	28,33	4
295	Kabupaten Manggarai Barat	6	13	2.044.731.502.455,80	28,35	4
296	Kabupaten Manggarai Timur	20	41	1.630.096.549.347,43	28,12	4
297	Kabupaten Nagekeo	9	17	2.083.912.787.857,70	28,37	4
298	Kabupaten Ngada	12	33	1.728.188.244.434,10	28,18	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
299	Kabupaten Rote Ndao	13	35	1.351.843.742.234,79	27,93	3
300	Kabupaten Sabu Raijua	8	14	1.304.084.420.439,32	27,90	3
301	Kabupaten Sikka	9	21	1.553.519.082.027,38	28,07	4
302	Kabupaten Sumba Barat	14	34	1.295.143.352.077,96	27,89	3
303	Kabupaten Sumba Barat Daya	7	12	1.563.039.152.451,30	28,08	3
304	Kabupaten Sumba Tengah	10	22	987.667.581.511,50	27,62	3
305	Kabupaten Sumba Timur	8	14	2.188.442.390.058,18	28,41	4
306	Kabupaten Timor Tengah Selatan	10	22	1.985.155.835.963,46	28,32	4
307	Kabupaten Timor Tengah Utara	10	23	2.444.600.917.422,54	28,52	3
308	Kota Kupang	22	42	3.061.794.876.358,25	28,75	4
309	Kabupaten Bengkayang	10	34	1.968.668.236.276,23	28,31	3
310	Kabupaten Kapuas Hulu	14	37	1.329.225.923.985,27	27,92	4
311	Kabupaten Kayong Utara	10	26	1.736.254.981.380,35	28,18	3
312	Kabupaten Ketapang	9	30	4.844.561.389.559,30	29,21	4
313	Kabupaten Kubu Raya	7	29	1.200.681.925.822,28	27,81	4
314	Kabupaten Landak	10	23	3.089.695.783.665,34	28,76	4
315	Kabupaten Melawi	11	32	2.362.888.703.640,03	28,49	4
316	Kabupaten Mempawah	15	34	1.453.536.186.155,99	28,01	4
317	Kabupaten Sambas	5	9	2.627.525.636.373,47	28,60	4
318	Kabupaten Sanggau	10	39	2.763.236.340.484,27	28,65	4
319	Kabupaten Sekadau	8	43	1.916.875.538.894,50	28,28	4
320	Kabupaten Sintang	13	30	4.186.495.738.524,35	29,06	4
321	Kota Pontianak	11	32	8.411.362.105.492,39	29,76	4
322	Kota Singkawang	6	19	2.056.276.097.841,20	28,35	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
323	Kabupaten Balangan	18	43	2.544.439.949.175,33	28,56	4
324	Kabupaten Banjar	14	40	3.788.996.562.622,12	28,96	4
325	Kabupaten Barito Kuala	15	34	2.302.431.530.666,56	28,46	4
326	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11	24	3.370.051.907.379,66	28,85	4
327	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	14	45	2.181.766.925.162,38	28,41	4
328	Kabupaten Hulu Sungai Utara	12	26	2.621.491.771.839,22	28,59	4
329	Kabupaten Kotabaru	18	33	3.119.574.229.211,50	28,77	4
330	Kabupaten Tabalong	18	45	3.909.592.163.410,17	28,99	4
331	Kabupaten Tanah Bumbu	12	27	3.869.808.661.174,13	28,98	4
332	Kabupaten Tanah Laut	13	28	4.249.756.200.583,40	29,08	4
333	Kabupaten Tapin	13	39	2.341.388.821.589,03	28,48	4
334	Kota Banjarbaru	14	32	2.950.314.439.744,51	28,71	4
335	Kota Banjarmasin	10	27	5.432.994.580.309,13	29,32	4
336	Kabupaten Barito Selatan	11	19	1.746.366.073.623,06	28,19	4
337	Kabupaten Barito Timur	12	21	1.414.876.270.717,39	27,98	4
338	Kabupaten Barito Utara	15	30	3.750.473.226.073,01	28,95	4
339	Kabupaten Gunung Mas	11	23	2.041.329.772.883,99	28,34	4
340	Kabupaten Kapuas	15	22	3.633.538.189.566,46	28,92	4
341	Kabupaten Katingan	16	24	3.296.787.660.271,62	28,82	4
342	Kabupaten Kotawaringin Barat	12	19	2.725.432.346.294,78	28,63	4
343	Kabupaten Kotawaringin Timur	10	29	3.537.781.380.795,82	28,89	4
344	Kabupaten Lamandau	11	28	1.642.684.272.520,98	28,13	4
345	Kabupaten Murung Raya	11	22	2.726.553.396.569,01	28,63	4
346	Kabupaten Murung Raya	8	17	1.871.272.328.788,86	28,26	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
347	Kabupaten Sukamara	18	40	2.119.923.500.392,84	28,38	4
348	Kabupaten Seruyan	8	20	3.279.683.519.259,68	28,82	4
349	Kota Palangka Raya	15	28	3.350.573.450.998,66	28,84	4
350	Kabupaten Berau	19	61	8.802.282.189.081,01	29,81	4
351	Kabupaten Kutai Barat	25	95	6.327.956.746.847,14	29,48	4
352	Kabupaten Kutai Kartanegara	15	41	78.585.349.584.201,00	32,00	4
353	Kabupaten Kutai Timur	18	38	9.780.644.494.000,34	29,91	4
354	Kabupaten Mahakam Ulu	20	73	2.165.414.266.326,94	28,40	4
355	Kabupaten Paser	11	27	7.224.784.129.347,48	29,61	4
356	Kabupaten Penajam Paser Utara	10	26	4.445.517.313.599,55	29,12	4
357	Kota Balikpapan	11	29	11.649.591.539.644,30	30,09	4
358	Kota Bontang	8	14	4.837.712.351.603,46	29,21	4
359	Kota Samarinda	19	47	19.087.291.017.178,10	30,58	4
360	Kabupaten Bulungan	17	46	5.938.886.142.784,81	29,41	4
361	Kabupaten Malinau	6	14	4.912.975.562.357,33	29,22	4
362	Kabupaten Nunukan	8	24	4.823.118.595.741,75	29,20	4
363	Kabupaten Tana Tidung	12	36	3.069.862.378.665,74	28,75	4
364	Kota Tarakan	8	27	6.102.475.060.118,16	29,44	4
365	Kabupaten Boalemo	13	45	1.503.133.523.151,18	28,04	4
366	Kabupaten Bone Bolango	18	59	1.464.851.581.193,36	28,01	4
367	Kabupaten Gorontalo	18	55	1.677.122.767.923,81	28,15	4
368	Kabupaten Gorontalo Utara	21	97	1.086.035.801.926,74	27,71	4
369	Kabupaten Pohuwato	14	33	1.344.977.024.044,28	27,93	4
370	Kota Gorontalo	12	42	1.505.715.849.607,04	28,04	4
371	Kabupaten Majene	18	46	1.586.901.364.430,20	28,09	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
372	Kabupaten Mamasa	11	22	1.436.300.079.313,93	27,99	4
373	Kabupaten Mamuju	16	32	2.195.520.018.348,41	28,42	4
374	Kabupaten Mamuju Tengah	15	31	1.276.549.458.356,28	27,88	4
375	Kabupaten Pasangkayu	13	38	1.959.789.231.078,40	28,30	4
376	Kabupaten Polewali Mandar	13	34	2.248.222.958.065,60	28,44	4
377	Kabupaten Bantaeng	15	46	2.190.597.915.092,73	28,42	4
378	Kabupaten Barru	10	37	2.235.575.053.820,79	28,44	4
379	Kabupaten Bone	12	42	2.855.437.813.211,79	28,68	4
380	Kabupaten Bulukumba	5	11	2.471.352.726.248,80	28,54	4
381	Kabupaten Enrekang	8	27	1.912.949.307.380,79	28,28	4
382	Kabupaten Gowa	10	35	3.903.055.429.622,76	28,99	4
383	Kabupaten Jenepono	20	61	2.259.587.439.868,55	28,45	4
384	Kabupaten Kepulauan Selayar	12	26	2.097.026.682.677,67	28,37	4
385	Kabupaten Luwu	12	28	2.941.141.165.823,51	28,71	4
386	Kabupaten Luwu Timur	9	26	3.174.469.501.411,87	28,79	4
387	Kabupaten Luwu Utara	13	47	1.512.068.746.762,80	28,04	4
388	Kabupaten Maros	11	34	3.016.366.260.353,42	28,74	4
389	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	13	32	2.199.821.465.838,06	28,42	4
390	Kabupaten Pinrang	12	27	2.871.764.725.145,50	28,69	4
391	Kabupaten Sidenreng Rappang	10	28	2.667.157.446.384,88	28,61	4
392	Kabupaten Sinjai	14	29	2.092.684.846.847,29	28,37	4
393	Kabupaten Soppeng	13	52	232.572.709.960,81	26,17	4
394	Kabupaten Takalar	18	69	1.543.635.848.372,32	28,07	3
395	Kabupaten Tana Toraja	14	37	3.585.665.701.127,71	28,91	3

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
396	Kabupaten Toraja Utara	11	34	8.991.160.332.425,60	29,83	4
397	Kabupaten Wajo	12	43	3.209.786.509.476,47	28,80	4
398	Kota Makassar	17	60	28.917.379.713.966,00	31,00	4
399	Kota Palopo	10	25	2.252.531.515.446,29	28,44	4
400	Kota Parepare	12	38	2.192.071.051.830,02	28,42	4
401	Kabupaten Bombana	12	36	1.744.131.185.997,78	28,19	4
402	Kabupaten Buton	8	21	1.676.382.556.797,06	28,15	4
403	Kabupaten Buton Selatan	12	41	1.039.143.439.454,48	27,67	4
404	Kabupaten Buton Tengah	13	40	1.728.031.339.254,43	28,18	4
405	Kabupaten Buton Utara	22	70	1.461.385.542.744,50	28,01	4
406	Kabupaten Kolaka	18	54	2.169.705.297.813,21	28,41	4
407	Kabupaten Kolaka Timur	15	38	1.200.864.548.749,96	27,81	4
408	Kabupaten Kolaka Utara	16	47	1.817.822.375.931,69	28,23	4
409	Kabupaten Konawe	15	29	1.985.794.380.123,18	28,32	2
410	Kabupaten Konawe Kepulauan	14	56	1.031.002.557.214,05	27,66	4
411	Kabupaten Konawe Selatan	16	36	1.988.864.259.333,31	28,32	3
412	Kabupaten Konawe Utara	12	29	1.396.048.832.186,60	27,96	4
413	Kabupaten Muna	23	69	2.461.345.848.189,38	28,53	4
414	Kabupaten Muna Barat	14	51	1.114.289.507.411,05	27,74	4
415	Kabupaten Wakatobi	7	13	1.707.735.304.732,95	28,17	4
416	Kota Bau-Bau	14	31	2.354.948.228.045,77	28,49	4
417	Kota Kendari	8	21	5.200.999.143.532,37	29,28	4
418	Kabupaten Banggai	11	37	2.329.977.666.818,89	28,48	4
419	Kabupaten Banggai Kepulauan	19	60	3.209.325.078.637,15	28,80	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
420	Kabupaten Banggai Laut	12	40	1.104.959.392.209,40	27,73	4
421	Kabupaten Buol	17	64	1.899.873.935.262,33	28,27	4
422	Kabupaten Donggala	16	65	2.590.033.791.770,48	28,58	4
423	Kabupaten Morowali	15	51	2.155.490.750.630,38	28,40	4
424	Kabupaten Morowali Utara	19	49	1.631.293.748.936,60	28,12	4
425	Kabupaten Parigi Moutong	18	49	2.472.322.694.353,19	28,54	4
426	Kabupaten Poso	16	57	2.263.694.433.099,65	28,45	4
427	Kabupaten Sigi	20	81	2.071.109.676.694,06	28,36	4
428	Kabupaten Tojo Una-Una	9	26	1.909.554.728.462,79	28,28	4
429	Kabupaten Tolitoli	17	61	2.080.408.517.507,45	28,36	4
430	Kota Palu	18	65	3.608.739.136.960,76	28,91	4
431	Kabupaten Bolaang Mongondow	17	51	1.580.832.490.604,09	28,09	3
432	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	21	52	1.122.678.222.710,57	27,75	4
433	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	12	33	996.338.550.117,09	27,63	4
434	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	15	48	1.212.409.627.802,58	27,82	4
435	Kabupaten Kepulauan Sangihe	17	47	1.608.497.583.590,63	28,11	4
436	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	25	63	1.378.395.836.619,61	27,95	4
437	Kabupaten Kepulauan Talaud	12	33	1.285.217.050.679,05	27,88	4
438	Kabupaten Minahasa	24	68	2.013.278.972.932,83	28,33	4
439	Kabupaten Minahasa Selatan	30	68	1.774.121.963.257,05	28,20	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
440	Kabupaten Minahasa Tenggara	17	42	1.450.379.562.340,72	28,00	4
441	Kabupaten Minahasa Utara	20	67	1.622.583.901.449,38	28,12	4
442	Kota Bitung	11	27	1.884.448.401.778,71	28,26	4
443	Kota Kotamobagu	22	52	1.226.094.295.184,27	27,83	4
444	Kota Manado	29	78	3.323.101.871.348,95	28,83	4
445	Kota Tomohon	22	66	1.632.473.451.001,28	28,12	4
446	Kabupaten Buru	20	61	1.372.125.382.079,78	27,95	4
447	Kabupaten Buru Selatan	26	83	1.356.611.927.885,86	27,94	3
448	Kabupaten Kepulauan Aru	20	66	1.659.126.918.614,80	28,14	1
449	Kabupaten Maluku Barat Daya	16	55	1.607.874.389.423,90	28,11	4
450	Kabupaten Maluku Tengah	15	32	2.686.287.148.447,72	28,62	4
451	Kabupaten Maluku Tenggara	11	28	1.497.479.250.516,69	28,03	4
452	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	27	61	1.692.847.617.646,10	28,16	4
453	Kabupaten Seram Bagian Barat	18	63	1.336.803.596.573,96	27,92	3
454	Kabupaten Seram Bagian Timur	15	44	1.905.215.352.579,93	28,28	3
455	Kota Ambon	10	22	1.756.170.273.070,79	28,19	4
456	Kota Tual	19	50	1.225.708.745.568,95	27,83	4
457	Kabupaten Halmahera Barat	16	50	1.399.154.370.002,82	27,97	4
458	Kabupaten Halmahera Tengah	11	21	2.184.491.953.393,26	28,41	4
459	Kabupaten Halmahera Timur	15	36	2.000.225.259.551,97	28,32	4
460	Kabupaten Halmahera Selatan	11	29	1.392.154.370.002,82	27,96	4
461	Kabupaten Halmahera Utara	16	45	1.780.576.344.920,96	28,21	4
462	Kabupaten Kepulauan Sula	21	64	1.553.335.380.969,84	28,07	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
463	Kabupaten Pulau Morotai	14	32	1.206.208.590.265,02	27,82	4
464	Kabupaten Pulau Taliabu	20	66	1.365.105.986.619,92	27,94	1
465	Kota Ternate	21	53	2.482.041.788.170,99	28,54	4
466	Kota Tidore Kepulauan	9	20	1.612.509.923.958,00	28,11	4
467	Kabupaten Asmat	11	26	2.618.627.092.612,30	28,59	4
468	Kabupaten Biak Numfor	17	36	14.444.514.325.130,10	30,30	3
469	Kabupaten Boven Digoel	13	47	3.751.352.907.551,41	28,95	1
470	Kabupaten Deiyai	22	66	1.385.971.279.881,64	27,96	4
471	Kabupaten Dogiyai	11	39	1.642.535.617.369,54	28,13	3
472	Kabupaten Intan Jaya	21	49	2.884.947.233.380,95	28,69	3
473	Kabupaten Jayapura	11	26	2.403.635.418.567,27	28,51	4
474	Kabupaten Jayawijaya	19	48	2.893.400.112.807,96	28,69	4
475	Kabupaten Keerom	18	46	2.259.210.803.579,88	28,45	4
476	Kabupaten Kepulauan Yapen	16	37	1.711.763.282.256,06	28,17	4
477	Kabupaten Lanny Jaya	19	48	2.216.103.666.852,34	28,43	4
478	Kabupaten Mamberamo Raya	21	54	1.482.866.982.645,70	28,02	1
479	Kabupaten Mamberamo Tengah	17	47	2.200.863.938.967,00	28,42	1
480	Kabupaten Mappi	10	33	2.839.008.673.304,62	28,67	3
481	Kabupaten Merauke	15	35	5.298.145.842.970,75	29,30	4
482	Kabupaten Mimika	14	54	5.554.611.650.526,01	29,35	4
483	Kabupaten Nabire	14	33	2.152.087.067.206,74	28,40	4
484	Kabupaten Nduga	20	70	2.362.958.194.315,39	28,49	3
485	Kabupaten Paniai	12	30	1.487.297.335.109,75	28,03	4
486	Kabupaten Pegunungan Bintang	27	96	3.116.286.485.728,07	28,77	4
487	Kabupaten Puncak	20	52	2.178.982.115.842,15	28,41	4

NO	PEMERINTAH KAB/KOTA	TEMUAN AUDIT	REKOMENDASI AUDIT	UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH	LN TOTAL ASET	KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
488	Kabupaten Puncak Jaya	18	61	2.036.294.550.988,10	28,34	4
489	Kabupaten Sarmi	26	65	2.142.314.628.019,90	28,39	3
490	Kabupaten Supiori	16	45	2.181.749.149.463,35	28,41	4
491	Kabupaten Tolikara	21	47	2.493.716.166.254,30	28,54	3
492	Kabupaten Waropen	19	68	2.528.982.115.842,15	28,56	4
493	Kabupaten Yahukimo	18	57	1.880.979.452.479,89	28,26	4
494	Kabupaten Yalimo	16	31	1.781.722.231.266,03	28,21	4
495	Kota Jayapura	13	42	2.686.353.933.426,85	28,62	4
496	Kabupaten Fakfak	11	29	3.211.828.208.395,27	28,80	4
497	Kabupaten Kaimana	7	16	2.595.894.430.979,35	28,58	4
498	Kabupaten Manokwari	16	41	2.676.478.005.344,76	28,62	4
499	Kabupaten Manokwari Selatan	12	33	1.046.557.346.105,38	27,68	4
500	Kabupaten Maybrat	17	43	1.876.694.480.083,79	28,26	4
501	Kabupaten Pegunungan Arfak	16	41	1.516.653.306.650,66	28,05	3
502	Kabupaten Raja Ampat	10	21	2.918.452.906.136,13	28,70	4
503	Kabupaten Sorong	16	35	4.988.079.832.140,38	29,24	4
504	Kabupaten Sorong Selatan	7	15	2.386.409.286.870,58	28,50	4
505	Kabupaten Tambrauw	8	18	2.570.892.962.678,22	28,58	4
506	Kabupaten Teluk Bintuni	14	45	5.471.031.489.851,71	29,33	4
507	Kabupaten Teluk Wondama	13	24	2.068.495.068.247,49	28,36	4
508	Kota Sorong	13	40	4.177.081.990.862,75	29,06	4

Lampiran 5.

Hasil Analisa Statistik

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	508	4.00	30.00	13.5650	4.40433
Rekomendasi HP	508	.00	163.00	37.8484	19.59669
Ukuran PEMDA	508	25.70	32.00	28.6008	.66872
Kualitas LK	508	1.00	4.00	3.8071	.53863
Valid N (listwise)	508				

Kualitas LK					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	6	1.2	1.2	1.2
	2.00	16	3.1	3.1	4.3
	3.00	48	9.4	9.4	13.8
	4.00	438	86.2	86.2	100.0
	Total	508	100.0	100.0	

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.058	1.010		1.048	.295		
	Temuan Audit	.000	.008	.002	.031	.975	.487	2.054
	Rekomendasi HP	-.005	.002	-.169	-2.707	.007	.487	2.054
	Ukuran PEMDA	.102	.035	.127	2.911	.004	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kualitas LK

3. Hasil Uji Simultan

Model Fitting Information				
Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood	Chi-Square	df	Sig.
Intercept Only	520.286			
Final	462.117	58.169	9	.000

4. Hasil Uji Kecocokan Model

Goodness-of-Fit			
	Chi-Square	df	Sig.
Pearson	1401.274	1503	.970
Deviance	462.117	1503	1.000

5. Hasil Uji Pseudo R-Square

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	.108
Nagelkerke	.169
McFadden	.112

6. Hasil Uji Likelihood Rasio Tests

Effect	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests		
	-2 Log Likelihood of Reduced Model	Chi-Square	df	Sig.
Intercept	472.603	10.486	3	.015
X1	467.334	5.217	3	.157
X2	493.646	31.529	3	.000
X3	476.611	14.494	3	.002

7. Parameter Estimasi

Kualitas LK ^a		B	Std. Error	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% Confidence Interval for Exp(B)	
								Lower Bound	Upper Bound
Tidak memberikan pendapat	Intercept	4.827	19.385	.062	1	.803			
	X1	.123	.108	1.316	1	.251	1.131	.916	1.397
	X2	.022	.025	.758	1	.384	1.022	.973	1.073
	X3	-.420	.678	.384	1	.536	.657	.174	2.481
Tidak wajar	Intercept	20.054	11.506	3.038	1	.081			
	X1	.121	.101	1.449	1	.229	1.129	.927	1.375
	X2	-.048	.031	2.512	1	.113	.953	.897	1.012
	X3	-.820	.404	4.121	1	.042	.441	.200	.972
Wajar dengan pengecualian	Intercept	20.993	7.439	7.963	1	.005			
	X1	-.063	.047	1.782	1	.182	.939	.856	1.030
	X2	.047	.010	23.570	1	.000	1.049	1.029	1.069
	X3	-.856	.262	10.665	1	.001	.425	.254	.710

7. Hasil Ketepatan Klasifikasi

Classification					
Observed	Predicted				Percent Correct
	Tidak memberikan pendapat	Tidak wajar	Wajar dengan pengecualian	Wajar tanpa pengecualian	
Tidak memberikan pendapat	0	0	0	6	0.0%
Tidak wajar	0	0	0	16	0.0%
Wajar dengan pengecualian	0	0	7	41	14.6%
Wajar tanpa pengecualian	0	0	3	435	99.3%
Overall Percentage	0.0%	0.0%	2.0%	98.0%	87.0%

Lampiran 6.

Laporan Cek Plagiarisme

turnitina			
ORIGINALITY REPORT			
18%	18%	8%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	lib.ibs.ac.id Internet Source		1%
2	jurnal.ut.ac.id Internet Source		1%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source		1%
4	jurnal.ubl.ac.id Internet Source		1%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source		1%
6	repository.tsm.ac.id Internet Source		1%
7	www.slideshare.net Internet Source		1%
8	eprints.mdp.ac.id Internet Source		1%
9	123dok.com Internet Source		1%

10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
12	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
14	fekon.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.trisakti.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
17	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	<1 %
18	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
20	inspektoratbekasikota.wordpress.com Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com	

	Internet Source	<1 %
22	rechtenstudent.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.untirta.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
25	Yayuk Harumiati, Payamta Payamta. "PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011", <i>Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan</i> , 2014 Publication	<1 %
26	ejournal.uigm.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.binamandiri.ac.id Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
29	adoc.pub Internet Source	<1 %
30	eprints.perbanas.ac.id Internet Source	

		<1 %
31	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
32	ojs.unm.ac.id Internet Source	<1 %
33	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
34	vdocuments.site Internet Source	<1 %
35	www.jurnal.umsb.ac.id Internet Source	<1 %
36	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
38	busakcommunity.blogspot.com Internet Source	<1 %
39	dianprandana.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	journal-fe.uniba.ac.id Internet Source	<1 %
41	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %

42	ntb.bpk.go.id Internet Source	<1%
43	Kusnadewi Lestari, Sri Rahayu, Yudi. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan Daerah, Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)", <i>Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja</i> , 2019 Publication	<1%
44	Evi Hidayakh, Sri Rahayu, Muhammad Gowon. "Determinan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi)", <i>Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja</i> , 2020 Publication	<1%
45	ejournal.ukrida.ac.id Internet Source	<1%

Exclude quotes Off Exclude matches Off
 Exclude bibliography Off

Lampiran 7.

Sekilas Biodata Penulis



Raihania Salsabila lahir pada 01 Oktober 1998 di Jambi, yang mana merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Agus Saleh dan Ibu Bevi Oktayana, juga kakak dari dua adik laki-laki bernama Rafid Mushaddaq dan Arkhan Zabran W.

Penulis menempuh pendidikan di SDN 28 Kota Jambi pada jenjang sekolah dasar, kemudian berlanjut di SMPN 01 Kota Jambi untuk jenjang menengah pertama, SMAN Titian Teras HAS untuk jenjang menengah atas, dan Politeknik Caltex Riau untuk jenjang Diploma 3. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana pada Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Esa Unggul.

Selain itu, penulis juga telah menyelesaikan tugas akhirnya dengan judul “Pengaruh Temuan Audit, Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, dan Ukuran Pemerintahan Daerah Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah di Indonesia”.

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, diharapkan tugas akhir yang berupa tulisan ini dapat memberikan beragam manfaat untuk berbagai pihak dan memberikan kontribusi positif secara khusus pada bidang keilmuan manajemen maupun bidang keilmuan lainnya.